

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Dana Aspirasi Anggota Dewan Naik Rp 1 Miliar
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Karawang
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.4
Edisi	: Senin, 1 Oktober 2018

Dana Aspirasi Anggota Dewan Naik Rp 1 Miliar

DANA aspirasi bagi masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang bertambah Rp 1 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hasil Perubahan tahun 2018. Jika ditotal, dana aspirasi masing-masing wakil rakyat Karawang mencapai Rp 6 miliar.



Sebelumnya dalam APBD murni dana aspirasi untuk mereka Rp 5 miliar per orang.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Teddy Rusfendi Sutisna, saat dihubungi, Minggu (30/9/2018). "Pokok-pokok pikiran pembangunan yang disampaikan wakil rakyat terakomodasi dalam APBD Perubahan Rp 1 miliar per orang," ujar Teddy.

Menurut dia, dengan adanya penambahan dana aspirasi itu, angka belanja daerah dalam APBD Perubahan bertambah sebesar Rp 362,17 miliar. Selain untuk aspirasi, penambahan belanja dialokasikan juga bagi pembayaran utang kepada pihak ketiga (rekanan) serta biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa di 67 desa.

Untuk menutupi defisit pada APBD perubahan, maka akan digunakan dana *saving*, di antaranya anggaran untuk gaji pegawai karena banyak yang pensiun. "Selain itu kami juga menggunakan silpa (sisa lebih penghitungan anggaran) tahun lalu,

juga terus berupaya mendorong pendapatan khususnya pendapatan dari sektor pajak daerah," kata Teddy yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang.

Dikatakan Teddy, peningkatan pajak daerah ditargetkan bertambah, khususnya dari sektor restoran dan hotel. Meskipun demikian, Teddy pun mengakui ada potensi-potensi pajak daerah yang mengalami penurunan.

Bahkan, lanjut dia, ada pajak daerah yang hilang seperti pajak mineral yang tidak bisa ditarik lagi karena kewenangannya sudah diambil alih pemerintah provinsi. Selain itu, dan pajak penerangan jalan yang mengalami penurunan.

Akhir pekan lalu, DPRD Karawang mengesahkan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2018. Hal itu dilakukan setelah melalui proses pembahasan yang panjang antara TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang.

Kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Karawang itu ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan

APBD Perubahan 2018, yang dilakukan melalui rapat paripurna DPRD tentang persetujuan bersama Bupati Karawang dan DPRD Karawang terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2018.

Meningkat

Dalam sambutannya, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengaku, pendapatan dalam APBD Perubahan meningkat menjadi Rp 4,419 triliun dari sebelumnya di APBD murni Rp 4,94 triliun. Sementara untuk belanja daerah naik sebesar Rp 362,17 miliar menjadi Rp 4,715 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 4,353 triliun.

"Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 2,88 triliun dan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 2,626 triliun," ujar Cellica.

Dikatakan Cellica, berdasarkan penghitungan perubahan pendapatan dan belanja daerah, terdapat defisit sebesar Rp 295,626 miliar. "Defisit itu dapat ditutup seluruhnya dengan pembiayaan neto," katanya. (Dodo Rihanto/"PR")***